



Jurnal Sosiologi

# DIALEKTIKA

## Perkembangan Teori Sosial

DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal *Dialektika* Volume VII, No. 1 Maret 2012 kali ini mencoba mengangkat isu utama tentang perkembangan teori-teori sosial yang pernah menjadi *mainstream* di jamaninya seperti Struktural Fungsional hingga perkembangan teori postmodern.

Selain pembahasan tentang perkembangan teoritik, dalam jurnal *Dialektika* kali ini juga ditampilkan berbagai gagasan tentang arti penting pendidikan bencana bagi masyarakat, dan isu tentang sistem peradilan yang menyiksa. Di samping itu, ditampilkan pula satu artikel tentang stigma media terhadap perilaku pengemudi berusia muda.

Dalam edisi kali ini ditampilkan beberapa hasil kajian yang telah dilakukan para peneliti, dan satu ringkasan skripsi dari mahasiswa Departemen Sosiologi FISIP Unair. Sengaja dalam edisi ini kembali ditampilkan berbagai hasil studi, karena sebagai jurnal ilmiah, *Dialektika* memang senantiasa berusaha mendeseminasikan karya-karya ilmiah yang dinilai penting untuk mengundang diskusi dan perdebatan ilmiah yang lebih lanjut dengan khalayak pembaca yang budiman.

Seluruh jajaran redaksi Jurnal *Dialektika* berharap isu yang diangkat dalam edisi kali ini dapat memperkaya sekaligus membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang langkah-langkah apa yang seharusnya dikembangkan untuk mengaplikasikan teori menyikapi perkembangan realitas sosial di era post-industrial.

**Redaksi**

---

**DIALEKTIKA** diterbitkan sebagai media informasi, dan diskusi masalah sosial. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, dan berbagai gagasan yang kritis. Redaksi mengundang para ahli, peminat, praktisi dan cendekiawan yang berbakat untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif persoalan sosial. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

## DAFTAR ISI

### TOPIK UTAMA

- (1) *STATE OF THE ART* TEORI POSTMODERN EMPIRIK  
Bagong Suyanto 1
- (2) STATE OF THE ARTS TEORI MODERNITAS  
DAN MODERNITAS GLOBAL  
Bambang Kuncoro 25
- (3) FUNGSIONALISME DAN NEOFUNGSIONALISME:  
ASUMSI DASAR, PERKEMBANGAN DAN KRITIK  
Rahma Sugihartati 35
- (4) “PETANI DALAM BELENGGU EKONOMI DAN POLITIK”  
(KAJIAN TENTANG KEMISKINAN PETANI INDONESIA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA, MASYARAKAT  
DAN PASAR)  
Adi Suhendra 46

### GAGASAN

- (1) MENDIDIK DAN MELATIH MASYARAKAT BERKESADARAN  
LINGKUNGAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA  
Zainuddin Maliki 52
- (2) SISTEM PERADILAN YANG MENYIKSA  
Dadang Trisasongko 64
- (3) MEDIA AND YOUNG PEOPLE’S DRIVING BEHAVIOUR  
Nadia Egalita 69

### KAJIAN

- (1) PERSOALAN KELEMBAGAAN DAN SISTEM PEMASARAN  
TEBAKAU DI JAWA TIMUR  
Soebagyo 74
- (2) MANFAAT FASILITASI PEMBIAYAAN UNTUK  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
Septi Ariadi 88
- (3) BONEKA BARBIE: STUDI TENTANG CITRA, MAKNA,  
DAN IDENTIFIKASI BUDAYA BONEKA BARBIE  
DI KALANGAN KOLEKTOR BONEKA BARBIE  
Ziyadatun Ni’mah 103

# MANFAAT FASILITASI PEMBIAYAAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Septi Ariadi

Mahasiswa S3 Pascasarjana UGM

## 1. Latar Belakang

Salah satu upaya yang semestinya dikembangkan Pemerintah Daerah, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan sekaligus memberdayakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah melalui kebijakan penganggaran dan dukungan pembiayaan program pembangunan yang benar-benar pro masyarakat miskin (*pro-poor*) (Waidl et al., 2009: viii-ix). Lebih dari sekadar menyalurkan berbagai program bantuan dana tunai langsung, seperti BLT atau jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, untuk membantu memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi kerakyatan atau UMKM, yang dibutuhkan tak pelak adalah program pembiayaan yang murah, mudah, dan kontekstual bagi para pelaku UMKM.

Dalam skema program Jalin Kesra (Jalan lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan jelas telah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tidak hanya *concern* untuk memfasilitasi pengembangan skala usaha dan pangsa pasar bagi para pelaku UMKM, tetapi juga *concern* untuk mendukung kebutuhan pembiayaan yang murah dan fleksibel bagi pengembangan UMKM. Berbagai skema

bantuan permodalan dan pembiayaan bagi para pelaku UMKM telah dirancang dan disalurkan sedemikian rupa dengan tujuan agar UMKM di Jawa Timur dapat bertahan dari tekanan krisis, dan bahkan keluar dari berbagai permasalahan yang tengah dihadapinya.

Dari hasil pemetaan yang dilakukan telah diketahui bahwa keberadaan UMKM di Jawa Timur selama ini masih menghadapi berbagai masalah, terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, pelaku UMKM hampir semuanya masih menghadapi keterbatasan modal usaha yang dimiliki. Kalaupun ada kucuran kredit, sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas, karena sebagian besar pelaku UMKM kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman, seperti agunan, meskipun usaha mereka layak. Di sisi lain lembaga perbankan, yang merupakan sumber pendanaan terbesar, masih memandang UMKM sebagai kegiatan berisiko tinggi, sehingga cenderung lebih memilih membatasi menyalurkan kredit ke UMKM dan lebih memilih membuka layanan kredit kepada usaha berskala besar yang dinilai lebih tidak berisiko.

Hasil kajian yang dilakukan Resmi Setia (2005), di bidang permodalan kendala-kendala yang acapkali dihadapi UMKM

secara lebih rinci adalah: Pertama, suku bunga kredit perbankan masih tinggi, sehingga kredit menjadi mahal. Kedua, Kurangnya informasi sumber pembiayaan dari lembaga keuangan non-bank, termasuk informasi jenis sumber pembiayaan serta persyaratan dan prosedur pengajuan. Ketiga, Sistem dan prosedur kredit dari lembaga keuangan bank dan non-bank rumit dan lama. Waktu tunggu pencairan kredit juga tidak pasti. Keempat, Kurangnya informasi dari perbankan mengenai standart proposal pengajuan kredit, sehingga pengusaha kecil tidak mampu membuat proposal yang sesuai dengan kriteria perbankan. Kelima, kurangnya pemahaman dari perbankan mengenai kriteria usaha kecil, sehingga jumlah kredit yang disetujui seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan usaha kecil.

Di berbagai kota/kabupaten, selama ini kebutuhan modal pelaku UMKM sering dipenuhi lewat pinjaman, baik dari tetangga maupun rentenir (*bank titi*), yang proses meminjamannya relatif tidak berbelit. Hal ini menunjukkan masih mahalnya biaya transaksi (*transaction cost*) pada institusi keuangan formal bagi para pelaku UMKM, sehingga membuat UMKM sulit meningkatkan kapasitas usahanya, ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Pada saat yang sama, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai, dan relatif memerlukan biaya besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena masih dipandang kurang menguntungkan.

Untuk mendukung dan mempercepat upaya pemberdayaan UMKM, dalam lima tahun terakhir sebetulnya tidak sedikit upaya

telah dilakukan dan tidak sedikit dana telah disalurkan bagi para pelaku UMKM di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur. Dalam batas-batas tertentu berbagai upaya dan fasilitas pembiayaan yang disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus diakui telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Tetapi, di sisi yang lain fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan UMKM ternyata seringkali masih tersendat-sendat dan bahkan tak sedikit sektor industri kecil yang *collaps* karena dirugikan oleh sisa-sisa berbagai kebijakan nasional di bidang industrial yang cenderung lebih menguntungkan industri berskala besar.

Kebijakan investasi proteksi, perkreditan dan perpajakan cenderung lebih mendukung kelangsungan perkembangan dan kegiatan monopolistik usaha besar daripada membangun iklim yang kondusif bagi maraknya perkembangan kelompok usaha kecil. Seperti dikatakan Yustika (2003: 106), bahwa selama ini pemerintah bukannya memproduksi kebijakan yang memperkuat sektor UMKM, tetapi—baik secara langsung maupun tidak langsung—malah berpotensi mematikan daya hidup perkembangan UMKM itu sendiri. Kebijakan pemerintah memberikan monopoli dan proteksi impor, misalnya acapkali menyebabkan UKM tidak mampu berkembang secara baik, dan bahkan dalam banyak kesempatan hanya beroperasi secara subsisten (Yustika, 2003: 117). Di samping itu, sering ditemui berbagai usaha berskala kecil hidupnya juga masih kembang-kempis karena kalah bersaing atau karena kekurangan modal. Tidak dimiliki dan dikuasainya teknologi pendukung, kualitas produksi yang rendah, tidak adanya standarisasi, terbatasnya pemasaran dan kemampuan finansial, dan ditambah lagi dengan kebijakan makro yang kurang

mendukung, akhirnya itu semua menjadi faktor gabungan yang menyebabkan perkembangan usaha berskala kecil menjadi tersendat atau sulit berkembang optimal.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, saat ini boleh dikata nasib sebagian UMKM masih belum berkembang maksimal, karena harus berhadapan dengan faktor-faktor yang sifatnya struktural. Kendati cukup banyak UMKM yang masih bertahan dan bahkan berkembang, namun demikian tidak sedikit UMKM yang pelan-pelan terpaksa gulung tikar karena tak kuat menahan tekanan kondisi perekonomian yang kembang-kempis dan tak kunjung membalik. Di tahun 2012 ini, ketika pemerintah benar-benar jadi memutuskan menaikkan kembali harga BBM akibat kenaikan harga minyak di dunia internasional, maka diperkirakan daya tahan UMKM bukan tidak mungkin akan makin kehilangan stamina, sehingga kapan mereka *collapse* mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi jika harga jual berbagai produk UMKM di pasaran turun, sementara harga bahan baku yang harus dibayar justru naik karena ada sebagian komponen yang terpaksa harus disesuaikan dengan kenaikan harga BBM? Di berbagai daerah, bukan rahasia lagi bahwa sejumlah UMKM terpaksa menghentikan produksi karena tidak kuat menanggung selisih kenaikan bahan baku dengan harga jual yang makin tidak menentu. Omzet yang turun terkadang hingga 50 persen lebih, sudah barang tentu akan membuat para pelaku ekonomi terpaksa mengurangi jumlah produksi dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Hasil kajian yang dilakukan Yustika (2003: 112) menemukan bahwa UMKM umumnya lebih mampu bertahan dalam

menghadapi tekanan krisis ekonomi, sehingga relatif tidak terpengaruh, dan bahkan tetap bisa tumbuh meski banyak usaha berskala besar justru *collapse*. Tetapi, ketika situasi krisis ekonomi datang bertubi-tubi, biaya produksi naik, sementara di sisi yang lain daya beli masyarakat justru menurun, iklim usaha sedang lesu, maka jangan kaget jika daya tahan itu pelan-pelan tergerogoti. Sepanjang tidak ada tindakan yang nyata untuk segera memutus mata rantai ini, niscaya yang terjadi bukan hanya meluasnya kembali kemiskinan dan meningkatnya jumlah pengangguran, tetapi juga rusaknya kembali fondasi ekonomi yang sebetulnya dalam lima-sepuluh tahun terakhir mulai terbangun. Dan, bagi para pelaku UMKM, situasi perekonomian yang fluktuatif bukan tidak mungkin menjadi pukulan yang mematikan dan menghabiskan sisa-sisa stamina yang mereka miliki.

Terlepas, bagaimana dan sejauhmana efektivitas dari berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dikembangkan selama ini, bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah disadari bahwa salah satu penopang kelangsungan hidup masyarakat miskin adalah UMKM. Berbeda dengan usaha berskala besar yang acapkali mensyaratkan kualifikasi tenaga kerja dan modal yang besar, keberadaan UMKM umumnya lebih sesuai dengan karakteristik tenaga kerja dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat miskin. Secara garis besar ada beberapa alasan mengapa UMKM perlu dibina dan dikembangkan, khususnya di daerah pedesaan. *Pertama*, karena UMKM merupakan salah satu sektor alternatif yang cocok dan kondusif untuk menampung limpahan tenaga kerja dari sektor pertanian yang makin lama makin jenuh akibat makin sempitnya lahan dan keterbatasan elastisitas

tenaga kerja. *Kedua*, karena persyaratan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan UMKM tidak terlalu rumit, kebutuhan investasinya terjangkau oleh kebanyakan masyarakat, serta bahan bakunya mudah diperoleh. *Ketiga*, karena UMKM memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi, bisa dilakukan secara komplementer dengan kegiatan produktif lainnya, memungkinkan memobilisasi potensi sumber daya setempat, serta dapat menciptakan struktur ekonomi pedesaan yang lebih terdiversifikasi sambil sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian. *Keempat*, UMKM juga dinilai sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa (Dewanta dkk., 1995: 211).

Studi yang tengah diusulkan ini bermaksud mengidentifikasi dan mengkaji sejauhmana efektivitas dan manfaat dari berbagai program pembiayaan yang telah digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pengembangan UMKM. Studi ini penting dilakukan, bukan saja sebagai dasar bagi proses penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM di Jawa Timur yang benar-benar relevan, efektif dan kontekstual. Tetapi, juga sekaligus karena pasca kenaikan BBM yang cepat atau lambat pasti terjadi, diperkirakan beban yang mesti ditanggung UMKM akan makin berat, dan jika tidak segera dilakukan langkah-langkah strategis niscaya satu per satu UMKM yang ada di Jawa Timur akan berjatuh.

## 2. Permasalahan

Secara garis besar, beberapa permasalahan yang dicoba dikaji dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana gambaran akses pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan UMKM?
2. Sumber-sumber pembiayaan seperti apakah yang selama ini diakses para pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pengembangan UMKM?
3. Sejauhmana kebutuhan pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur terhadap bantuan program pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM?
4. Bagaimana gambaran tentang pola pemanfaatan dan efektivitas bantuan pembiayaan UMKM bagi pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur?
5. Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat upaya pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Timur?
6. Dukungan apa saja sebetulnya yang dibutuhkan UMKM di Provinsi Jawa Timur agar dapat tetap *survive*, dan bahkan mengembangkan usaha yang ditekuninya?

## 3. Tujuan

Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah:

1. Memetakan akses pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan UMKM.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan yang selama ini diakses para pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pengembangan UMKM.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur terhadap bantuan program pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM.

4. mengidentifikasi pola pemanfaatan dan efektivitas bantuan pembiayaan UMKM bagi pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur.
5. Mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat upaya pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Timur.
6. Mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan UMKM di Provinsi Jawa Timur agar dapat tetap *survive*, dan bahkan mengembangkan usaha yang ditekuninya.

#### 4. Hasil yang Diharapkan

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terumuskannya kebijakan dan program prioritas untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan program pembiayaan untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Timur.

#### 5. Metode dan Prosedur Kerja

Kegiatan ini pada dasarnya bukan hanya bermaksud mengkaji situasi problematik yang dihadapi para pelaku UMKM dalam upaya mengembangkan usaha yang mereka tekuni, tetapi juga mencoba mengkaji efektivitas program bantuan pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur, serta sekaligus merumuskan kebijakan dan program pengembangan UMKM yang benar-benar kontekstual di Provinsi Jawa Timur.

Untuk memperoleh masukan dan data yang akurat, dalam kegiatan ini bahan-bahan yang dibutuhkan dikumpulkan melalui beberapa cara, yakni:

*Pertama*, mengkaji dan menganalisis data sekunder terbaru mengenai kondisi dan perkembangan UMKM serta kondisi demografis penduduk Provinsi Jawa Timur.

Data sekunder yang dibutuhkan telah dicari dari BPS, survei-survei lokal, dan data dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Uraian tentang kondisi umum UMKM dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ini penting untuk mengetahui peta makro permasalahan UMKM dan perkembangan sektor ekonomi kerakyatan pada umumnya di Provinsi Jawa Timur.

*Kedua*, melakukan *review* terhadap hasil-hasil studi mengenai masyarakat UMKM dan efektivitas pelaksanaan program bantuan pembiayaan bagi UMKM di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Review* terhadap hasil penelitian ini dibatasi hanya pada hasil penelitian terbaru selama lima tahun terakhir. Tujuan dilakukan *review* terhadap hasil studi tentang UMKM dan kemiskinan ini adalah untuk memperoleh kerangka acuan dan kerangka analisis dalam rangka memahami secara teoritik berbagai faktor yang mempengaruhi upaya pengembangan UMKM.

*Ketiga*, melakukan survey dan penggalian data primer ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang valid dan akurat mengenai kondisi terbaru dan berbagai masalah yang dihadapi UMKM di Provinsi Jawa Timur. Data primer ini, digali dari masyarakat atau tepatnya para pelaku UMKM yang ada di lokasi penelitian. Jumlah keluarga miskin yang menjadi responden, ditetapkan sebanyak 500 pelaku UMKM. Lokasi penelitian ditetapkan di 5 kota/kabupaten, yaitu: Kabupaten Sumenep, Tuban, Nganjuk, Pasuruan dan Malang. Di masing-masing kota/kabupaten jumlah responden yang diteliti ditetapkan sebanyak 100 pelaku UMKM, yang dicari dari 2 desa/kelurahan yang berbeda.



Tabel 1  
Lokasi Penelitian

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah
Pakandangan Barat	Bluto	Kabupaten Sumenep	50
Gapuran Barat	Gapuran		50
Sambong Gede	Merak Urak	Kabupaten Tuban	50
Karang Sari	Tuban		50
Tembarak	Kertosono	Kabupaten Nganjuk	50
Waru Jayeng	Tanjung Anom		50
Bangil	Bangil	Kabupaten Pasuruan	50
Pacalukan	Prigen		50
Girimojo	Karang Ploso	Kabupaten Malang	50
Banjar Arum	Singosari		50
Plumbon Gambang	Gudo	Kabupaten Jombang	50
Cukir	Diwek		50
<b>Jumlah</b>			<b>500</b>

Keempat, dari 500 pelaku UMKM yang diteliti, dalam studi ini kemudian dipilih 50 pelaku UMKM yang telah diwawancarai secara mendalam (*in-depth interview*), terutama menyangkut berbagai kendala yang dialami, dan mekanisme survival yang dikembangkan untuk menyasiasi perubahan situasi pasar dan iklim persaingan yang makin ketat. *In-depth interview* dilakukan dengan mendasarkan pada *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan melakukan wawancara secara mendalam ini, bukan saja dapat diperoleh pengalaman langsung para pelaku UMKM dalam menyasiasi keadaan, tetapi juga dampak yang mereka alami akibat terjadinya perubahan situasi ekonomi di pasar.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, telah diolah dan dipadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari hasil *in-depth interview*. Di hasil akhir laporan, selain dirumuskan kembali temuan-temuan pokok hasil studi dan sejumlah rekomendasi, juga diketengahkan rencana aksi yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan

dan program pengembangan UMKM dan model bantuan pembiayaan yang efektif bagi pengembangan UMKM di tahun-tahun mendatang.

## 6. Kesimpulan

Pertumbuhan dan peran UMKM sesungguhnya masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah daerah terhadap upaya pemberdayaan UMKM, membaiknya kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, maka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan diri niscaya akan lebih besar. Dalam rangka menjamin optimisme dan mendorong pengembangan UMKM di masa depan, salah satu yang perlu ditangani adalah bagaimana menyediakan fasilitas pembiayaan yang benar-benar kontekstual dan efektif. Berikut beberapa temuan pokok dari kegiatan kajian ini yang perlu diperhatikan sebelum merumuskan program-program peningkatan peran

fasilitas pembiayaan bagi para pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur.

1. UMKM secara umum merupakan usaha yang telah lama ditekuni masyarakat, dan sebagian bahkan merupakan usaha turun-temurun. Warga masyarakat yang terlibat dalam usaha mikro dan UKM umumnya kurang berpendidikan dan secara sosial-ekonomi rentan, serta pas-pasan, atau bahkan kekurangan. Meski sebagian pelaku UMKM mengaku usahanya mengalami perkembangan, tetapi sebagian besar pelaku UMKM cenderung mengalami penurunan kondisi usaha, akibat iklim persaingan yang makin ketat dan terjadinya proses pengikisan modal.
2. Skala pemasaran produk-program UMKM di Provinsi Jawa Timur bervariasi. Meski sebagian telah berhasil menembus pasar ekspor, tetapi sebagian besar pelaku UMKM masih beredar sebatas di pasar lokal—setingkat desa, kecamatan atau kota/kabupaten. Sebagian besar tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM adalah berasal dari keluarga atau kerabat ini. Strategi seperti ini sengaja ditempuh untuk mengurangi biaya produksi agar margin keuntungan yang diperoleh tidak habis karena harus dikompensasi dengan kenaikan biaya produksi yang makin tidak sebanding dengan harga jual produk.
3. Bagi sebagian pelaku usaha kecil dan menengah, alasan mereka menekuni usaha di sektor ini karena hasilnya dinilai memang menguntungkan. Namun demikian, tidak sedikit pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang mengaku menekuni usaha ini karena terpaksa tidak ada pilihan kesempatan kerja lain yang bisa mereka masuki, atau karena tidak dimilikinya modal untuk mengembangkan usaha baru yang lebih menguntungkan. Bagi warga masyarakat yang terlibat di sektor UMKM, salah satu kelebihan sektor ini adalah pada fleksibilitas dan kelenturannya dalam pengaturan waktu kerja, sehingga masih bisa *disambi* dengan pekerjaan sampingan yang lain.
4. Dalam upaya pengembangan usaha yang ditekuni, para pelaku UMKM umumnya masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang menyangkut persoalan permodalan, teknologi produksi, pasokan bahan baku, promosi dan pemasaran. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM ini, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para pelaku UMKM guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.
5. Meski pemerintah sebetulnya sudah berusaha menawarkan berbagai program bantuan dan menggulirkan skema-skema bantuan permodalan berbunga murah bagi para pelaku UMKM, tetapi dalam banyak kasus akses para pelaku UMKM terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN umumnya masih rendah.
6. Di mata para pelaku UMKM, prosedur dan persyaratan lembaga perkreditan formal yang terlalu rumit dan juga karena pinjaman yang

- diperoleh tidak selalu sesuai dengan kebutuhan —baik dalam hal jumlah maupun waktu—, serta kewajiban bagi peminjam untuk menempatkan agunan material sering dinilai merepotkan, dan menyebabkan tumbuhnya keengganan atau ketakutan pelaku UMKM berhubungan dengan lembaga perkreditan formal. Para pelaku usaha mikro dan UKM umumnya terpaksa memilih lembaga keuangan informal, seperti rentenir dan para pelepas uang lain yang ada di sekitarnya, karena prosedurnya dinilai mudah, bersifat personal dan cepat —meski dari beban suku bunga sebenarnya diakui sangat berat.
7. Pengetahuan para pelaku UMKM terhadap fasilitas pembiayaan yang ditawarkan pemerintah umumnya rendah. Bahkan meskipun sebagian pelaku UMKM mengetahui adanya tawaran fasilitas pembiayaan dari pemerintah daerah, tetapi tidak banyak yang mencoba mengakses tawaran bantuan kredit permodalan itu karena selain sudah memiliki akses terhadap sumber permodalan lain, juga karena mereka merasa prosedurnya bakal rumit atau karena khawatir pengajuan pinjaman mereka ditolak. Di mata pelaku UMKM, prosedur atau cara kerja lembaga perkreditan formal yang ditawarkan pemerintah seringkali dinilai terlalu birokratis dan “berjarak”.
  8. Asal atau sumber permodalan yang selama ini diakses dan dimanfaatkan para pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur umumnya berasal dari pinjaman, khususnya pinjaman dari rentenir, tengkulak dan majikan tempat mereka bekerja.
  9. Dibandingkan pinjaman untuk membiayai kegiatan produktif, para pelaku UMKM umumnya lebih banyak meminjam untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif daripada untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Dalam hal ini, adanya tekanan kebutuhan hidup dan tidak dimilikinya tabungan yang cukup tampaknya menjadi penyebab mengapa para pelaku usaha mikro dan usaha kecil lebih cenderung meminjam untuk kebutuhan konsumtif daripada kebutuhan produktif.
  10. Sebagai pelaku usaha ekonomi kerakyatan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil umumnya terisolasi dan tidak memiliki akses yang memadai untuk dapat memperoleh pinjaman modal usaha yang berbunga lunak. Akses mereka selama ini lebih banyak kepada lembaga kredit informal yang acapkali mematok beban suku bunga yang tinggi, sedangkan untuk sumber peminjaman yang berbunga lunak, mereka umumnya mengaku terbatas aksesnya.
  11. Dalam rangka bertahan dan melangsungkan kehidupan serta usahanya, para pelaku UMKM umumnya lebih memilih mengembangkan diversifikasi usaha dan mencari sumber-sumber penghasilan yang terdeferensiasi daripada hanya menggantungkan kepada satu usaha pokok yang suatu saat rawan kolaps ketika harus menghadapi situasi perekonomian yang kurang menentu. Di tengah iklim persaingan usaha yang makin ketat, para pelaku UMKM merasa lebih aman jika mereka memiliki sekian banyak sumber penghasilan daripada hanya bergantung

- pada satu sumber penghasilan pokok.
12. Idealnya para pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah mengakses sumber-sumber pembiayaan yang murah dan mudah. Tetapi, di lingkungan tempat tinggal responden, sumber pembiayaan dan tempat mereka dapat meminjam uang umumnya lebih banyak rentenir atau bank thithil dan tengkulak, sehingga mau tidak mau para pelaku UMKM harus menanggung beban suku bunga pinjaman yang tinggi. Akses ke sumber-sumber pembiayaan formal umumnya rendah. Sedangkan akses pada sumber pembiayaan tanpa beban bunga, seperti pinjaman dari saudara atau kerabat relatif tidak banyak dan jumlahnya pun terbatas.
  13. Hal-hal yang dilakukan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha seringkali adalah dari tabungan dan dengan cara utang kepada orang lain, terutama kerabat yang sebisa mungkin tanpa bunga. Namun demikian, ketika mereka sudah berkali-kali utang tanpa bunga dan ketika kebutuhan modal tidak bisa dipenuhi dari pinjaman kerabat atau tabungan, maka yang seringkali dilakukan pelaku UMKM adalah menggadaikan barang, menjual barang atau utang kepada pihak lain –meski hal itu harus dibayar dengan beban suku bunga yang tinggi.
  14. Dalam banyak hal, kemampuan para pelaku UMKM untuk mengakses sumber-sumber permodalan umumnya lemah. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dan kebutuhan konsumtif, para pelaku UMKM umumnya lebih condong mengandalkan pada kehadiran lembaga perkreditan informal yang banyak beroperasi di berbagai daerah, terutama bank thithil dan tengkulak, atau pelepas uang lain yang sifatnya informal. Di mata para pelaku UMKM, yang menjadi pertimbangan utama memilih lembaga kredit adalah lembaga yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan mendadak.
  15. Dibandingkan lembaga kredit informal, di mata pelaku UMKM nyaris tidak ada kelebihan dari lembaga kredit formal. Dari segi birokrasi pengurusan kredit, kecepatan pencairan pinjaman, persyaratan agunan, ketentuan pembayaran cicilan dan ancaman sanksi jika terjadi penunggakan, umumnya keberadaan lembaga kredit informal masih dinilai lebih baik. Padahal, seperti diakui sebagian besar pelaku UMKM, mereka sesungguhnya sangat membutuhkan bantuan pembiayaan dari pemerintah yang berbunga lynak.
  16. Selama ini berbagai jenis bantuan yang pernah diterima para pelaku usaha mikro dan kecil umumnya adalah bantuan yang sifatnya karitatif, seperti program bantuan beras murah dan subsidi kesehatan, sementara itu untuk bantuan fasilitas pembiayaan atau bantuan modal usaha umumnya masih kurang dirasakan para pelaku UMKM.
  17. Akibat kondisi sosial ekonomi yang rentan dan miskin, sering terjadi bantuan atau pinjaman produktif yang diterima, terkadang, bahkan sering sebagian besar dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk kegiatan konsumtif, terutama ketika mereka menghadapi tekanan kebutuhan hidup yang tidak terelakkan.

Musim paceklik, musim sepi order, dan masa-masa menunggu panen atau masa menunggu penerimaan upah seringkali menjadi masa yang rawan bagi para pelaku UMKM untuk terjerumus dalam perangkap utang dan kemudian memanfaatkan bantuan permodalan yang diterima untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif.

18. Peran bantuan modal yang selama ini pernah diterima pelaku UMKM, baik dari lembaga perkreditan formal maupun informal umumnya hanya sebagai modal tambahan, dan bukan sebagai modal pokok yang utama.

### 7. Rekomendasi

Upaya pemberdayaan UMKM dan usaha untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan para pelaku UMKM dalam lima tahun terakhir harus diakui telah makin terbuka. Berbagai paket kredit atau bantuan modal usaha yang ditawarkan kepada para pelaku UMKM dewasa ini makin beragam dan mudah. Dunia perbankan sendiri yang sebelumnya condong lebih berorientasi kepada pemberian kredit pelaku ekonomi berskala besar, ketika banyak perusahaan besar masih menanggung kredit macet, maka pilihan alternatif yang menarik sebagai sasaran tawaran kredit tak pelak adalah para pelaku UMKM.

Di Provinsi Jawa Timur, salah satu upaya yang dikembangkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan kredit bagi para pelaku UMKM adalah dengan pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan, seperti jaminan kredit yang ditanggung APBD melalui Jamkrida, dan juga berbagai kebijakan lain yang intinya mempermudah akses pelaku UMKM

terhadap sumber-sumber pembiayaan. Dalam rangka mempercepat proses pemberdayaan dan pengembangan fasilitas pembiayaan untuk pelaku UMKM, berikut beberapa langkah yang direkomendasikan untuk diperhatikan.

Pertama, sebagai sector perekonomian yang relatif rentan dan terbatas, salah satu kebutuhan UMKM yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah fasilitas pembiayaan yang mudah dan pro pelaku usaha ekonomi kerakyatan. Meski selama ini, para pelaku UMKM umumnya dapat memenuhi kebutuhan kredit atau pinjaman dari para pelepas uang yang sifatnya informal, seperti tengkulak atau rentenir. Tetapi, dengan beban bunga yang tinggi sesungguhnya para pelaku UMKM lebih membutuhkan fasilitas bantuan kredit dan modal usaha yang terjangkau dan memahami kepentingan mereka. Di lapangan, selama ini memang benar bahwa para pelaku UMKM umumnya memenuhi kebutuhan modal dari pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi, yakni sekitar 2% -10% per bulan yang berasal dari koperasi, BMT, BPR dan para pelepas uang, namun tetap dinilai menguntungkan karena mudah dan cepat. Hanya saja dengan kewajiban membayar cicilan dengan suku bunga yang tinggi, tentu hal itu akan mempengaruhi margin keuntungan yang mereka peroleh, yang ujung-ujungnya bukan tidak mungkin akan menyebabkan terjadinya proses pengikisan modal usaha.

Dalam konteks ini, pembentukan lembaga atau institusi kredit permodalan alternatif yang fleksibel dan memahami karakteristik UMKM diharapkan dapat memberikan pilihan kepada para pelaku UMKM agar ketergantungan mereka pada kelompok pedagang perantara, tengkulak

atau pengepul dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Pada masa-masa di mana tidak ada pemasukan yang diperoleh, para pelaku UMKM umumnya rawan masuk dalam perangkap ketergantungan dan potensial menjadi korban eksploitasi kelompok lain,

sehingga untuk mencegah agar para pelaku UMKM tidak makin terperdaya, maka ada baiknya jika disediakan fasilitas kredit khusus untuk mengantisipasi guncangan kebutuhan hidup dalam rumah tangga para pelaku UMKM.

Tabel 2  
Program Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM

Isu Prioritas	Program	Tujuan
Skala pemasaran produk UMKM yang relatif terbatas	Program promosi produk UMKM Jatim	Meningkatkan dan memfasilitasi pengembangan pangsa pasar UMKM Jatim
Para pelaku UMKM rawan terpaksa memanfaatkan program bantuan modal untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif	Program bantuan tabungan dan <i>cost of living</i> bagi para pelaku UMKM di masa paceklik  Revitalisasi program Takesra-Kukesra	Mengurangi tingkat kerawanan dan kemungkinan pelaku UMKM terperangkap dalam cara kerja bank thithil atau rentenir yang cenderung membebani mereka dengan suku bunga pinjaman yang tinggi
Para pelaku UMKM umumnya sulit menembus/mengakses lembaga perkreditan formal	Program jaminan kredit bagi pelaku UMKM	Memfasilitasi dan menjamin peluang UMKM mengakses lembaga perkreditan formal
UMKM cenderung mengalami proses pengikisan modal usaha karena sebagian harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	Program bantuan fasilitasi pembiayaan dengan insentif suku bunga murah bagi pelaku UMKM yang mengakses lembaga keuangan formal	Mendorong dan memberi kesempatan UMKM untuk melakukan akumulasi modal dan investasi
Pelaku usaha mikro dan kecil umumnya rentan dan tidak memiliki agunan dan akses yang cukup untuk meminjam ke lembaga perkreditan formal	Program bantuan modal usaha bagi kelompok UMKM (sentra UMKM)	Mendorong pengembangan kelompok dan sentra UMKM di Jatim
Para pelaku UMKM cenderung rawan terperangkap pada kerja tengkulak, rentenir dan bank thithil	Program revitalisasi dana CSR untuk memfasilitasi pembiayaan pengembangan UMKM  Program revitalisasi peran Kopwan dalam upaya pengembangan UMKM	Mencegah pelaku UMKM terjerumus dalam praktik kerja pelepas uang informal dan sekaligus membuka akses mereka terhadap sumber permodalan alternatif
Akses terhadap sumber keuangan/pembiayaan formal cenderung terbatas	Program pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) yang mendukung upaya pengembangan UMKM	Meningkatkan peran lembaga perkreditan di tingkat <i>grass root</i> untuk ikut terlibat dalam pengembangan UMKM
UMKM cenderung rawan kolaps dan lemah dalam manajemen pengembangan usaha yang inovatif	Program pembinaan dan pendampingan UMKM	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pelaku UMKM
Pengetahuan tentang prosedur dan fasilitas pembiayaan perbankan relatif kurang dan "berjarak"	Debirokratisasi prosedur peminjaman kredit bagi pelaku UMKM	Membuka peluang UMKM mengakses lembaga perbankan
Iklim persaingan yang makin kompetitif di kalangan sesama pelaku UMKM	Program pengembangan diversifikasi produk UMKM Jawa Timur	Mendorong peningkatan produktivitas pelaku UMKM

Kedua, selain modal, perlu disadari bahwa salah satu kebutuhan pelaku UMKM yang takk terhindarkan adalah adanya tabungan yang cukup. Tabungan dan investasi adalah modal dan penyangga yang dibutuhkan untuk mengatasi guncangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan dialami pelaku UMKM. Berbagai peristiwa seperti lonjakan harga bahan baku, fluktuasi harga produk, atau kemalangan yang menimpa anggota keluarga para pelaku UMKM bisa menjadi guncangan yang menyebabkan usaha yang ditekuni bangkrut apabila tidak ada cadangan modal yang cukup. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, akan sangat fungsional jika selain bantuan modal, di saat yang sama mereka juga bisa memperoleh fasilitas bantuan seperti dana *cost of living* yang dapat mereka manfaatkan untuk menutupi kebutuhan di musim paceklik atau masa menunggu datangnya penghasilan, sehingga mereka tidak mudah menjadi bahan permainan para tengkulak dan rentenir.

Di kalangan pelaku UMKM, seberapa banyak mereka bisa menyisihkan uang untuk ditabung, sudah barang tentu tergantung kepada kemampuan usaha yang ditekuni apakah dapat menghasilkan surplus yang bisa disimpan atau diinvestasikan dalam kapasitas produktif. Sepanjang margin keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM makin tipis, maka besar kemungkinan peluang mereka untuk mengembangkan diri akan makin kecil karena tidak didukung modal yang cukup.

Untuk membantu upaya mengembangkan UMKM, karena itu selain bantuan modal usaha, yang tak kalah penting sebetulnya adalah bantuan dalam bentuk program jaring pengaman yang berfungsi sebagai katup penyelamat dan penyangga serta semacam asuransi social yang berfungsi untuk mencegah agar mereka tidak menjadi

korban dari dominasi tengkulak atau rentenir yang acapkali memanfaatkan ketidakberdayaan dan kerentanan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

Ketiga, perlu memperbesar akses para pelaku UMKM ke lembaga kredit perbankan dengan cara mengembangkan sistem kelembagaan perbankan dan lembaga keuangan lain yang khusus, yang mau memahami karakteristik para pelaku UMKM. Seperti berkali-kali ditegaskan pemerintah, bahwa lembaga perbankan seyogianya lebih melayani para pelaku UMKM dengan prosedur yang lebih mudah, dan dengan ketentuan suku bunga pinjaman yang tidak terlalu membebani pelaku UMKM. Ada baiknya jika persyaratan UMKM yang meminjam ke lembaga perbankan hanya didasarkan pada kemampuan membayar, dan tidak ditambah lagi dengan persyaratan lain yang merepotkan pelaku UMKM.

Selama ini, harus diakui sebagai bagian dari usaha ekonomi kerakyatan, para pelaku UMKM masih menghadapi kendala tersendiri ketika harus berhubungan struktur kelembagaan perbankan dan lembaga kredit formal. Selama ini, beberapa kendala yang harus dihadapi UMKM selain persoalan prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit dan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan, beban suku bunga yang ditetapkan lembaga perbankan juga masih membebani pelaku UMKM.

Untuk membuka peluang pelaku UMKM mengakses sumber-sumber permodalan yang dibutuhkan, selain perlu dilakukan debirokratisasi prosedur peminjaman bagi UMKM, yang tak kalah penting adalah bagaimana mengembangkan sumber-sumber permodalan alternatif dari

BUMN melalui program CSR, LKM, Kopwan, dan lain-lain yang pro kepada kepentingan dan kondisi UMKM di Jawa Timur. Pola bantuan pinjaman lunak dari BUMN (program kemitraan dan bina lingkungan), misalnya perlu ada pembenahan lebih lanjut, agar lebih tepat sasaran, tepat guna, dan mempercepat akselerasi pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

Di sisi lain, untuk membantu memfasilitasi akses UMKM ke berbagai sumber permodalan, ada baiknya jika kebijakan penjaminan keuangan bagi pelaku UMKM terus ditingkatkan. Penjaminan keuangan adalah suatu perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada pihak yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak bisa dibayar penuh oleh peminjam.

Berkaitan dengan pengoptimalan daya guna penjaminan kredit yang disediakan pemerintah ini, dari hasil penelitian Tim Peneliti Litbang Direktorat Perbankan Syariah Bank merekomendasikan agar program penjaminan pembiayaan UMKM dari pemerintah ada baiknya jika juga melibatkan seluruh Bank Syariah yang selama ini telah berkembang pesat. Hasil studi Litbang Direktorat Perbankan Syariah Bank juga menyarankan agar Pemda tingkat propinsi maupun kodya/kabupaten juga mencanangkan program penjaminan penjaminan pembiayaan syariah untuk UMKM di daerah masing-masing mengingat dana pemerintah pusat juga terbatas, yang diambilkan dari pos pemberdayaan masyarakat dalam APBD, yang mana dana tidak seluruhnya digelontorkan dalam program pengentasan kemiskinan, tetapi sebagian untuk program penjaminan.

Keempat, untuk dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non bank yang berdasarkan pada kelayakan usaha, maka di saat yang sama perlu dilakukan pembinaan, pendampingan, pembenahan dan peningkatan kemampuan para UMKM agar lebih terorganisir dan tertata. Peningkatan kemampuan kewirausahaan, organisasi, manajemen, ketrampilan teknis usaha yang digeluti, kemampuan inovasi, manajemen keuangan seperti perencanaan keuangan, maupun kemampuan menyusun proposal kelayakan usaha sangat dibutuhkan guna menjadikan UMKM dapat mengembangkan produktivitas dan daya saing yang tinggi, baik dengan sesama pelaku UMKM maupun usaha besar lainnya.

Kelima, program pengembangan UMKM di Jawa Timur ke depan hendaknya lebih diarahkan pada program pengembangan produk-produk UMKM yang benar-benar berorientasi pada permintaan atau pasar, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kebutuhan riil UMKM (*market oriented, demand driven program*). Sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang rawan gejolak, pengembangan UMKM perlu didorong agar dapat menghasilkan pertumbuhan produktivitas UMKM dan mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Dikatakan berkelanjutan di sini, dalam arti pengembangan UMKM didorong ke arah yang tidak sekadar berorientasi pada peningkatan produktivitas dan perluasan pasar, tetapi juga berorientasi pada proses akumulasi modal dan investasi, serta pengembangan asset produksi bagi UMKM.

Keenam, upaya untuk memfasilitasi pengembangan UMKM di Jawa Timur ada



baiknya jika didukung pula oleh peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengembangan LKM ini besar kemungkinan akan lebih efektif bagi pelayanan permodalan UMKM karena LKM sendiri boleh dikata merupakan bagian dari sistem pembiayaan *grass root*, yang secara fisik dekat dengan nasabahnya sehingga benar-benar memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan, dan kemudahan dalam pengawasan. Namun pengembangan LKM ini harus diakui hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, baik permasalahan internal

maupun eksternal, antara lain seperti terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, permodalan, masih kurangnya kepercayaan masyarakat, lemahnya jaringan (*networking*) dan inovasi di bidang pemasaran, terbatasnya teknologi informasi yang dimiliki, sistem dan prosedur operasional yang belum mapan, serta belum optimalnya pengawasan dan pembinaan dari otoritas yang berwenang. Untuk itu, dalam rangka pengembangan UMKM, peran dan potensi LKM seyogianya juga direvitalisasi agar dapat mendukung upaya fasilitasi pembiayaan bagi para pelaku UMKM (\*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahimisa-Putra, Heddy Shri (penyunting)., 2003. *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa*. Yogyakarta: KEPEL Press.
- Basri, Hasan (Penyunting). 1999. *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Chambers, Robert, 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chambers, Robert, 1996. *PRA (Participatory Rural Appraisal): Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius bekerjasama dengan OXFAM.
- Chaniago, Adrinof A., 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dewayanti, Ratih & Erna Ermawati Chotim. 2004. *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*. Bandung: Akatiga dan ASPPUK.
- Emmerson, Donald K., 2001. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia.
- Fuady, Ahmad Helmi dkk., 2002. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin dan Mies Grijns, 1995. *Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR-Bun Jawa Barat*. Bandung: Akatiga.
- Irawan, Andi & Bayu Airlangga Putra (eds.), 2007. *Kewirausahaan UKM, Pemikiran dan Pengalaman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Junaidi, A., 2003. *Prospek Rintisan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah*. Infokop Nomor 22 tahun XIX Membangun Sistem Keuangan Koperasi. Jakarta.
- James, Kenneth dan Narongchai Akrasane, 1993. *Aspek-Aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus ASEAN*. Jakarta: LP3ES.

- Mubyarto dkk. 1993. *Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media dan P3PK UGM.
- Mubyarto & Edy Suandi Hamid. 1986. *Kredit Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Iwan & Rochmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Pribadi, Fancholiq J. & Ferdinand Andrias Mundung, 2007. *Manajemen Usaha UMKM, Konsep, Pengalaman Empiris dan The Best Practice*. Madang: Bayumedia.
- Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sadoko, Isono, Maspiyati & Dedi Haryadi, 1995. *Pengembangan Usaha Kecil, Pemihakan Setengah Hati*. Bandung: Akatiga.
- Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan, Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suyanto, Bagong & Septi Ariadi, 2001. *KUT: Solusi atau Masalah Bagi Petani?*. Surabaya: Lutfansah.
- Sritua Arief, Dialektika Hubungan Ekonomi Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”, dalam *KELOLA* Gajah Mada University Business Review, No. 10, Tahun IV, 1995.
- Tjitrosoepomo, Gembong dkk. 1991. *Industri Pedesaan dan Masalah Pengembangannya*. Yogyakarta: Universitas Wangsa Manggala.
- Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Taufiq, M, 2003. “Membangun Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi”, dalam *Infokop* Nomor 23 XIX Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triwibodo, Darmawan & Nur Iman Subono (eds.), 2009. *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia, Lebih dari Sekadar Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta: Prakarsa dan LP3ES.
- Widyaningrum, Nurul dkk. 2003. *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*. Bandung: Akatiga.
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Wadi, Abdul, Yuna Farhan & Diding Sakri (eds.), 2009. *Anggaran Pro-Kaum Miskin, Sebuah Upaya Menyejahterakan Masyarakat*. Jakarta: Prakarsa dan LP3ES.

*State Of The Art Teori Postmodern Empirik*

Bagong Suyanto

*State Of The Arts Teori Modernitas  
dan Modernitas Global*

Bambang Kuncoro

*Fungsionalisme dan Neofungsionalisme:  
Asumsi Dasar, Perkembangan dan Kritik*

Rahma Sugihartati

*"Petani dalam Belenggu Ekonomi dan Politik"  
(Kajian Tentang Kemiskinan Petani Indonesia  
Ditinjau dari Perspektif Negara, Masyarakat dan Pasar)*

Adi Suhendra

*Mendidik dan Melatih Masyarakat Berkesadaran  
Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana*

Zainuddin Maliki

*Sistem Peradilan yang Menyiksa*

Dadang Trisasongko

*Media And Young People's Driving Behaviour*

Nadia Egalita

*Persoalan Kelembagaan dan Sistem Pemasaran Tembakau  
di Jawa Timur*

Soebagyo

*Manfaat Fasilitas Pembiayaan  
untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Septi Ariadi

*Boneka Barbie: Studi Tentang Citra, Makna,  
dan Identifikasi Budaya Boneka Barbie  
di Kalangan Kolektor Boneka Barbie*

Ziyadatun Ni'mah



**DIALEKTIKA**  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jl. Darmawangsa Dalam, 60286 Surabaya Jawa Timur  
Telp (031) 5034015, 5011744, 5047754, Fax. (031) 5012442  
E-mail: j-sosiologi-ua@yahoo.com